

BAB V

PEMBAHASAN

1. Derajat Non-Partisipasi

1. Manipulasi

Pada tingkatan ini masyarakat hanya sebatas mengikuti kegiatan musrenbang sebagai formalitas dengan melakukan manipulasi informasi, yang mana tidak ada warga yang diberikan penjelasan mendalam mengenai teknis musrenbang pada tahun ini yang dilakukan secara daring. Pada musrenbang kelurahan Cinangka di masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang tidak puas atas pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini karena pelaksanaan yang berbeda dari biasanya. Selain dari pihak LPM Kelurahan, dalam Musrenbang kelurahan Cinangka ini pula terlibat diantaranya perwakilan dari pemuda yang di undang berdasarkan RW masing-masing, keterlibatan pemuda dalam Musrenbang kelurahan ini sebagai formalitas untuk menghadiri undangan. Dan begitu pula terkait kendala, pada Musrenbang di tahun 2021 terkendala oleh PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena adanya pandemi Covid-19.

Pada perwakilan dari tokoh masyarakat sekitar yang mengaku masih kurangnya arahan terkait pelaksanaan musrenbang tahun 2021 karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengharuskan semua kegiatan tidak boleh tatap muka kecuali pada saat pra-musrenbang saja dengan mengikuti protokol kesehatan dan keberatan atas peraturan baru yakni setiap pembangunan harus menyertakan surat tanpa adanya format yang baku dari pemerintah kota Depok, yang dimana pengerjaan itu menjadi lebih rumit seperti misalnya harus adanya surat hibah. Dari pernyataan masyarakat, terlihat bahwa pelaksanaan musrenbang pada tahun 2021 ini terdapat perbedaan dari pelaksanaan sebelumnya dari mulai juknis (petunjuk teknis) hingga persyaratan pembangunan yang mengharuskan pembuatan surat tanpa adanya format baku dari pemerintah kota Depok.

2. Terapi

Dalam tingkatan ini masyarakat terlibat langsung dalam suatu program, namun keterlibatan masyarakat tidak didasari oleh suatu dorongan mental, psikologis dan diikuti konsekuensi ke-ikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program. Masyarakat dalam posisi tahap ini hanya menjadi obyek pada program, pemerintah memberitahu sedikit kepada masyarakat mengenai beberapa programnya yang telah disetujui oleh wakil masyarakat dan masyarakat hanya bisa mendengarkan. Dalam program musrenbang ini keterlibatan peran masyarakat sangat berperan penting guna mendengarkan masukan-masukan dan ide-ide pembangunan di masa yang akan datang dari mulai tahap pra-musrenbang hingga pelaksanaan pembangunan, proses pengambilan keputusan terkait program-program yang diusulkan dalam musrenbang pada tahun 2021 yakni dengan melihat juknis (petunjuk teknis) dan setiap RW bergiliran dalam menyampaikan aspirasi mereka pada tahap pra-musrenbang yang selanjutnya disaring menjadi program prioritas dan non-prioritas.

Selain itu program-program yang masyarakat usulkan diantaranya yakni pembangunan berupa fisik (saluran air, rumah, pembangunan jalan umum, dsb) dan non-fisik (pelatihan, penyuluhan, dsb). Berdasarkan beberapa pernyataan dari pihak Kelurahan Cinangka dan lapisan masyarakat dapat dilihat bahwa indikator tangga terapi telah dilakukan dalam proses Musrenbang kelurahan Cinangka. Meskipun masyarakat menjadi objek pada program, pihak kelurahan memberitahu sedikit kepada masyarakat mengenai beberapa programnya yang telah disetujui oleh wakil masyarakat (tokoh pemuda dan tokoh agama) dan masyarakat hanya bisa mendengarkan.

2. Derajat Tanda Partisipasi

1. Pemberian Informasi

Pada tahap pemberian informasi ini didefinisikan dengan pihak pemerintah yang hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait program, namun masyarakat tidak diberdayakan untuk dapat mempengaruhi hasilnya. Dalam tahap ini kegiatan musrenbang baru hanya terkait SOP kegiatan yang biasanya berlangsung namun perbedaannya ada pada

pelaksanaan teknis yang berbeda dari musrenbang tahun sebelumnya yakni secara virtual.

Jadi, dalam proses berlangsungnya acara musrenbang pada tahun 2021 ini telah terjadi komunikasi antar warga dan pemerintah setempat (dalam hal ini adalah pihak kelurahan) karena masyarakat mengetahui tentang teknis dan SOP mengenai kegiatan program, terdapat juga pemberitahuan terkait tahap pra-musrenbang dan pelaksanaan musrenbang itu sendiri.

1. Konsultasi

Konsultasi adalah mereka berdiskusi dengan banyak elemen-elemen masyarakat mengenai berbagai agenda. Dan seluruh saran serta kritik akan didengarkan, namun mereka yang berkuasa tetap yang akan memutuskan, apakah saran dan kritik masyarakat tersebut dipakai atau tidak. Dalam musrenbang, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa saja aspirasi untuk wilayah mereka dan diajak untuk berdiskusi terkait pembangunan di wilayah per-RT/RW masing-masing.

Musrenbang terdapat sesi pra-Musrenbang yang dimana dalam pelaksanaannya kegiatan utama pra-Musrenbang adalah menyiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan kelurahan secara baik. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, pra-Musrenbang Kelurahan Cinangka tetap dilaksanakan secara tatap muka dengan standar protokol kesehatan yang berlaku yakni menggunakan masker, disediakan hand sanitizer dengan berlokasi di kediaman masing-masing Ketua RW.

Dalam impelentasinya Musrenbang tidak hanya mengusulkan terkait fisik namun juga non-fisik. maka masyarakat disarankan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik di wilayah mereka dan kebanyakan dari perwakilan RW mengatakan bahwa masyarakatnya mengusulkan terkait pelatihan-pelatihan untuk ibu PKK dan pemuda. Dari hasil wawancara, telah dilihat bahwa tahap konsultasi ini sudah terpenuhi yakni dengan mendengarkan aspirasi warga dari pihak Kelurahan Cinangka itu sendiri walaupun kegiatan menyalurkan aspirasi ini terhambat karena adanya peraturan protokol kesehatan Covid-19 yang mengharuskan membatasi kerumunan, jadi hanya perwakilan inti saja.

1. Penentraman

Penentraman adalah sebuah wujud atau bentuk usaha untuk menampung ide-ide, saran-saran dan masukan-masukan dari masyarakat guna sekedar meredakan keresahan dari masyarakat. Pemerintah berjanji akan melakukan berbagai saran dan kritik dari masyarakat, akan tetapi janji tinggal janji dimana mereka secara diam-diam menjalankan rencana semulanya. Oleh karena hal tersebutlah tangga kelima ini tergolong pada kategori takonisme (pertanda).

Sebenarnya penyampaian informasi (pemberitahuan) adalah sebuah bentuk pendekatan kepada masyarakat supaya mendapatkan legitimasi masyarakat atas semua program-program yang dicanangkan. Konsultasi yang disampaikan hanya bentuk upaya guna mengundang ketertarikan umum mempertajam legitimasi, tidak untuk secara sungguh-sungguh mendapatkan pertimbangan dan mengetahui keberadaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang di tahun 2021 sangat berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya karena dari sisi teknis yang berbeda yaitu dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 dan dari sisi masukan yang diberikan masih banyak yang belum terlaksana karena adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Maka masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan Musrenbang maupun penerapan hasil dari Musrenbang itu sendiri.

Melalui forum diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsultan, tentu warga mengharapkan bahwa usulan yang mereka ajukan dapat didengar dan dipertimbangkan dalam penyusunan terkait rencana pembangunan. Ketika usulan program yang diajukan oleh masyarakat dapat diterima dengan baik maka dapat meningkatkan rasa percaya terhadap pemerintah dan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat sangatlah penting untuk keberlangsungan program yang diberikan. Jangan sampai kehadiran masyarakat hanya sebagai formalitas semata. Dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Cinangka, masyarakat merasa usulan yang mereka

ajukan didengar dan dipertimbangkan oleh konsultan, meskipun dalam tahap ini usulan yang mereka ajukan belum tentu terealisasi dalam penerapannya.

Secara umum pelaksanaan Musrenbang telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat ditampung oleh perwakilan per-RW masing-masing baik itu pembangunan berupa fisik maupun non-fisik dengan kegiatan pra-Musrenbang dan diskusi dalam Musrenbang itu sendiri meskipun masukan yang diajukan oleh warga belum terjamin akan terealisasikan.

3. Derajat Kuasa Warga

1. Kemitraan

Dalam kegiatan Musrenbang adanya upaya kemitraan ditujukan melalui forum pra-Musrenbang yang dimana dalam forum tersebut masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan segala aspirasi mereka melalui perwakilan masyarakat atau yang memiliki pengaruh di wilayahnya seperti ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda (karang taruna), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cinangka. Maka dari itu peran LPM dalam pra-Musrenbang sangat berperan penting karena menyangkut penyaluran pemberdayaan masyarakat sebagai penanggungjawab untuk selalu mengkomunikasikan setiap perkembangan pembangunan kepada masyarakat sekitar Kelurahan Cinangka agar masyarakat merasa dilibatkan dan mendapat imbal balik dari adanya pra-Musrenbang.

Hasil dari wawancara kepada perwakilan dari beberapa narasumber terkait tangga kemitraan ini sudah terpenuhi dapat dilihat dari pernyataan dari LPM Kelurahan Cinangka bahwa adanya kerjasama antara pihak kelurahan dengan perwakilan masyarakat seperti RT/RW, ormas, tokoh masyarakat/pemuda, dan pihak lain yang terkait.

1. Kuasa yang di Delegasi

Pengambilan keputusan dalam musrenbang Kelurahan Cinangka berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak pemerintahan dengan masyarakat. Aspirasi dari masyarakat sangat beragam namun tidak sepenuhnya dapat diakomodir oleh pihak pemerintah karena dalam

pembangunan wilayah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pada keputusan akhir yang disetujui berupa pembangunan fisik diantaranya pembuatan saluran air (drainase), perbaikan jalan umum, rumah, dan posyandu. Dari segi non-fisik diantaranya yaitu pelatihan-pelatihan ibu-ibu pkk/pemuda.

Peran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada tingkatan pendelegasian kekuasaan ini sudah terlaksana karena masyarakat sudah menyampaikan aspirasi mereka namun memang dalam pengerjaan dalam pembangunan masih harus disaring menjadi program prioritas dan non-prioritas.

2. Pengawasan Masyarakat

Dalam tingkatan ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan, memiliki kuasa atas pengelolaan dan akses terhadap dana. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

Peran masyarakat dalam tingkatan ini memiliki kekuasaan penuh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana program. Musrenbang sebagai program perencanaan pembangunan banyak sekali melibatkan masyarakat untuk tercapainya keberhasilan program.

Berdasarkan keterangan dari narasumber, masih banyak kekurangan dalam pengerjaan implementasi musrenbang karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun dalam partisipasi masyarakat, warga Kelurahan Cinangka sudah dapat berperan aktif dalam menyampaikan aspirasinya di program Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Meskipun dalam pengerjaan pembangunan yang mereka ajukan masih belum terlaksana karena terhambat oleh kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).